

Probity Audit Oleh Inspektorat Kota Kotamobagu (Studi Pada Pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu Tahun Anggaran 2022)

Kartika S. Mokoagow¹, Evi E. Masengi², Abdul R. Dilapanga³

¹²³Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ ikhasary@unima.ac.id, ² evimasengi@unima.ac.id, ³ abdulrahmandilapanga@unima.ac.id

INFO ARTIKEL ABSTRACT

Key word:
Probity Audit
Accountability
Transparency

This research focuses on studying the implementation of probity audit by the Kotamobagu City Inspectorate in the construction of the Kotamobagu Library Building in Fiscal Year 2022. The aim is to assess the extent to which probity audit is being applied by the government institution to minimize the risk of violations in the procurement process of goods and services, particularly for significant development projects like buildings. The research adopts a qualitative approach, including in-depth interviews, literature studies, and field observations for data collection. Data analysis involves techniques such as data reduction, presentation, and drawing conclusions. The study also includes validity tests to ensure the credibility and reliability of the data. The results of this study show that there are several significant issues affecting the effectiveness of probity audits: lack of supporting documents, insufficient transparency, and the absence of comprehensive performance evaluation. This research not only provides insights into the challenges of implementing probity audit but also highlights the need for better integration between good procurement principles and public administration oversight. As such, the recommendations put forward can serve as a reference for practical and policy improvements for relevant agencies at local and national levels in order to achieve higher standards of public service delivery and sustainable financial management.

INTISARI

Kata kunci:
Probity Audit
Akuntabilitas
Transparansi

Penelitian ini berfokus pada kajian penerapan *probity audit* oleh Inspektorat Kota Kotamobagu pada pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu Tahun Anggaran 2022. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana *probity audit* diterapkan oleh institusi pemerintah untuk meminimalisir risiko pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk proyek pembangunan yang signifikan seperti gedung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, termasuk wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi lapangan untuk pengumpulan data. Analisis data melibatkan teknik-teknik seperti reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini juga mencakup uji validitas untuk memastikan kredibilitas dan keandalan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang signifikan yang mempengaruhi efektivitas *probity audit* yaitu : kurangnya dokumen pendukung, tidak memadainya transparansi, dan tidak adanya evaluasi kinerja yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai tantangan dalam penerapan *probity audit* tetapi juga menyoroti perlunya integrasi yang lebih baik antara prinsip pengadaan barang/jasa yang baik dan pengawasan administrasi publik. Dengan demikian, rekomendasi yang diajukan dapat

Diterima : 25-11-2024
Dipublish : 2-12-2024

* Korespondensi Penulis. e-mail: ikhasary@gmail.com

* DOI : 10.53682/administro.v6i2.10616

menjadi acuan untuk perbaikan praktis dan kebijakan bagi instansi terkait di tingkat lokal maupun nasional dalam rangka mencapai standar pelayanan publik yang lebih tinggi dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

Copyright © 2024 (Kartika S. Mokoagow). All Right Reserved

1. Pendahuluan

Pada Prinsipnya pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu proses yang dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, serta bebas dari benturan kepentingan. Prinsip-prinsip ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai guna dari belanja publik dan memastikan bahwa setiap tahapan dan prosedur dalam pengadaan tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku [1]. Secara khusus, *Probity Audit* merupakan sebuah mekanisme kontrol yang penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip tersebut. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP) Nomor 3 Tahun 2019, *Probity Audit* mencakup pengawasan independen dan pemberian pendapat obyektif mengenai apakah proses pengadaan barang/jasa telah memenuhi persyaratan kejujuran [2].

Namun, pada faktanya sering kali menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya dapat ditemukan pada proses pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu pada tahun anggaran 2022. Permasalahan dalam kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam proses, serta akuntabilitas dalam pertanggungjawaban telah menjadi perhatian penting. Mengingat pentingnya proyek ini bagi pemenuhan kebutuhan sarana edukatif di Kota Kotamobagu, ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip pengadaan dapat berakibat pada inefisiensi penggunaan anggaran serta mengurangi kepercayaan publik terhadap instansi terkait.

Probity audit merupakan instrumen penting dalam administrasi keuangan publik, khususnya dalam pengelolaan Pengadaan Barang /Jasa. Dengan penerapan *probity audit* yang efektif, diharapkan dapat terwujud pengelolaan keuangan publik yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif, serta terhindar dari praktik KKN. Hal ini ultimately akan bermuara pada tercapainya tujuan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Probity Audit, sebagai sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada peninjauan fisik dan observasi langsung, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Teknik audit ini memungkinkan auditor untuk mengumpulkan data dan informasi dari lapangan secara langsung, yang sangat berguna dalam menilai sejauh mana kepatuhan terhadap peraturan telah dijaga. Selain itu, diskusi dan

wawancara dengan pihak-pihak terkait memberikan sudut pandang tambahan yang dapat mengungkapkan potensi kendala yang dihadapi selama proses berlangsung. Dalam hal ini, penerapan *Probity Audit* oleh Inspektorat Daerah Kotamobagu menjadi fokus utama penelitian ini untuk mengevaluasi efektivitas serta kontribusi audit tersebut dalam mendorong praktek pengadaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam praktiknya, pelaksanaan *probity audit* sering menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman yang memadai tentang konsep *probity audit* di kalangan pejabat pengadaan dan pelaksana proyek. Selain itu, terdapat pula kendala terkait sumber daya manusia yang terbatas dan belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pengawasan. Pada tahun anggaran 2022, Pemerintah Kota Kotamobagu mengalokasikan dana untuk pembangunan gedung perpustakaan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan literasi masyarakat. Pembangunan ini menjadi sangat strategis mengingat perpustakaan berperan sebagai pusat sumber informasi dan pembelajaran yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa yang terkait dengan pembangunan gedung perpustakaan tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Kemudian, secara lebih luas, *Probity Audit* bukan hanya sekedar alat teknis untuk menjalankan evaluasi. Lebih dari itu, *Probity Audit* harus dipahami sebagai sebuah mindset, sikap, dan serangkaian tindakan yang didasarkan pada kejujuran, kebenaran, serta integritas. Nilai-nilai ini harus dijaga agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Dalam kerangka pengadaan barang/jasa, kejujuran atau *probity* harus menjadi jiwa dari setiap proses dan tahapan, bukan hanya sebatas mengikuti prosedur administratif yang tertulis dalam aturan formal.

Tujuan dari penelitian ini penting untuk memverifikasi sejauh mana prinsip-prinsip integritas, kejujuran, dan kewajaran diterapkan dalam proses pengadaan barang dan jasa di sektor publik. Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik, yang pada akhirnya dapat mencegah praktik korupsi dan penyimpangan lainnya. Urgensitas penelitian ini sangat tinggi mengingat pentingnya peran audit integritas dalam memastikan bahwa tindakan pengadaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta bahwa hasil dari

pengadaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan akurat.

Pentingnya penerapan *Probity Audit* dalam pengadaan barang/jasa, khususnya dalam proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu, juga sejalan dengan kebutuhan akan peningkatan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Berdasarkan standar audit internal pemerintah Permenpan Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008, *Probity Audit* dapat dilihat sebagai suatu jenis audit yang berfokus pada kinerja dan tujuan tertentu, yang salah satunya adalah memastikan akuntabilitas dalam berbagai aspek pengadaan. Akuntabilitas di sini mengimplikasikan tanggung jawab para pejabat pengadaan dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai, baik dari perspektif administrasi, tata kelola, maupun pelaksanaan di lapangan [3].

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, keberhasilan penerapan *Probity Audit* dapat memberikan keyakinan bahwa setiap proses dan tahapan berjalan sesuai dengan rencana, aturan, serta tujuan yang telah ditetapkan. Dengan dukungan audit ini, seharusnya para manajer pengadaan dapat lebih yakin dalam mengambil keputusan berdasarkan konteks dan fakta yang telah dikumpulkan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana *Probity Audit* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kotamobagu telah berhasil memastikan pelaksanaan pengadaan Gedung Perpustakaan Kotamobagu sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan yang telah diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dengan demikian, *Probity Audit* berpotensi memberikan kontribusi besar dalam menjamin terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang/jasa. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai efektivitas *Probity Audit* dalam mengawal pelaksanaan pengadaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi dan pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

2. Metode Penelitian

Metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah riset yang bersifat deskriptif, lebih sering menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dan lebih menonjolkan proses dan makna [4]. Dalam konteks ini, *probity audit* adalah sebuah proses untuk memastikan integritas, kejujuran, dan transparansi dalam pengadaan publik. *Probity audit* bertujuan untuk mengidentifikasi dan memitigasi potensi risiko yayasan yang terkait dengan integritas, seperti manipulasi tender, korupsi, kolusi, dan nepotisme [5]. Dalam penelitian ini, *probity audit* diterapkan dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kota Kotamobagu agar dapat memberikan pandangan yang lebih mendalam

mengenai keefektifan dari *probity audit* dalam konteks spesifik pengadaan publik pada sektor konstruksi

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kepatuhan Terhadap Peraturan

Penelitian ini telah memaparkan data dan analisis tentang penerapan *probity audit* oleh Inspektorat Kota Kotamobagu, dengan fokus khusus pada pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu untuk Tahun Anggaran 2022. Pembahasan ini secara khusus akan mengulas temuan utama yang berkaitan dengan penerapan prinsip *probity audit* dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah. Temuan penelitian ini menekankan pada masalah utama yaitu kurangnya dokumen pendukung, minimnya transparansi, serta tidak adanya evaluasi kinerja dalam pelaksanaan proyek.

Salah satu temuan penting yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah ketidakterdisebarnya dokumen pendukung yang memadai dalam proses *probity audit* di Inspektorat Kota Kotamobagu. Kurangnya dokumen pendukung ini mengakibatkan adanya kesulitan dalam melakukan verifikasi terhadap ketaatan proses pengadaan sesuai regulasi yang ada, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa. Dalam konteks pengadaan yang efektif dan transparan, dokumen pendukung memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tahap proses dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi. Ketidacukupan dokumen ini disinyalir sebagai penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *probity* yang seharusnya memberikan kepastian hukum dan etika dalam pengadaan.

Dari perspektif teori administrasi publik seperti yang dijelaskan oleh Kurnia, administrasi yang terpercaya dalam institusi publik berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen dan operasional organisasi dilakukan dengan baik, maka kurangnya dokumen pendukung dapat menyebabkan pengelolaan menjadi tidak optimal dan berdampak negatif terhadap tujuan pelayanan publik [6]. Administrasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari usaha Kerjasama dengan melibatkan segenap sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan secara efektif, efisien dan ekonomis. Tujuan administrasi dapat di capai apabila adanya serangkaian usaha, yang pada umumnya terdiri atas planning, organizing, staffing, directing dan controlling, serta adanya Kerjasama antara para pelaku kegiatan administrasi yang memanfaatkan asas pengefektifan dan efisiensi [7]. Selain itu, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yolanda Mariana Lekipera da Costa, implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang baik seharusnya mampu memastikan bahwa keuangan daerah dikelola dengan efisiensi dan akuntabilitas [8]. Namun

dalam kasus ini, absennya dukungan dokumentasi memadai menghambat proses pengawasan yang berkelanjutan.

Kurangnya transparansi dalam pelaksanaan *probity audit* di Inspektorat Kota Kotamobagu juga menjadi temuan utama. Prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa seperti yang ditekankan dalam PP Nomor 12 Tahun 2021 adalah dasar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang akuntabel dan melayani kepentingan publik. Tanpa transparansi, ada peningkatan risiko terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam kajian teori administrasi publik, peran administrasi publik adalah menjamin pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, dan hal ini tidak dapat tercapai jika informasi dan proses tidak terbuka dan diawasi secara jelas [9].

Sebagai tambahan, penelitian oleh Samsul Rizal menunjukkan bahwa pelaksanaan *probity audit* yang tidak menyeluruh, seperti halnya di Kotamobagu, memperlemah hasil optimal dari audit tersebut. Ketidakmampuan untuk menghasilkan laporan audit yang kuat dapat berdampak pada kredibilitas institusi dalam memberikan akuntabilitas public [10].

Tidak adanya evaluasi kinerja yang sistematis juga merupakan faktor yang signifikan dalam penerapan *probity audit* di Kotamobagu. Evaluasi kinerja diperlukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari proses pengadaan serta memastikan bahwa prosedur yang ada selaras dengan tujuan kebijakan publik. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal yang efektif harus mencakup evaluasi rutin atas keakuratan dan keandalan prosedur yang diterapkan [11].

Dalam hal ini, absennya evaluasi sistematis dalam proses *probity audit* dapat mengakibatkan tidak teridentifikasinya kelemahan atau risiko yang potensial dalam proses pengadaan, yang menghambat manajemen risiko efektif [12]. Pelaksanaan evaluasi yang komprehensif akan membantu memperbaiki kelemahan sistemis sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Secara empiris, studi oleh Smith menegaskan bahwa institusi dengan kepatuhan tinggi terhadap *probity audit* menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan proyek pengadaan secara keseluruhan [13]. Temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa *probity audit* tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi tetapi juga berfungsi sebagai alat manajerial penting dalam meningkatkan efektivitas dan reputasi organisasi secara keseluruhan.

Dengan pertimbangan di atas, sangat penting bagi Inspektorat Kota Kotamobagu untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dengan memperkuat dokumentasi pendukung, meningkatkan transparansi proses, serta menerapkan evaluasi kinerja yang sistematis dan berkelanjutan. Strategi ini bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas tetapi juga untuk

membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi pengawas dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban [14]. Sejalan dengan literatur dan studi sebelumnya, langkah-langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan efektif, serta memastikan bahwa proses pengadaan sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penelitian ini telah memaparkan data tentang penerapan *probity audit* oleh Inspektorat Kota Kotamobagu pada proyek pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu Tahun Anggaran 2022. Fokus utama penelitian terletak pada penerapan *probity audit* sebagai alat strategis untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana dalam proyek tersebut. Peneliti akan membahas temuan ini dengan menghubungkannya pada konteks teori administrasi publik dan pengelolaan keuangan daerah.

Probity audit digunakan sebagai alat strategis untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana dalam proyek pembangunan. *Probity audit* adalah jenis audit yang menekankan pada prinsip integritas, kebenaran, dan kejujuran dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) sesuai dengan peraturan yang berlaku (Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008). Dalam konteks administrasi publik, *probity audit* memiliki makna penting sebagai mekanisme pengendalian dan evaluasi pengadaan untuk memastikan bahwa semua aspek keuangan, baik dari segi perencanaan hingga pelaksanaan, dilakukan secara akuntabel.

Dari perspektif teoritis, administrasi publik berfungsi untuk memastikan pemerataan distribusi pendapatan, melindungi hak masyarakat, dan memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menjalankan tanggung jawab mereka, Gray dalam Harbani Pasolong [9]. *Probity audit* menambah lapisan perlindungan terhadap integritas proses pengadaan dengan menilai kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditentukan, memastikan bahwa semua prosedur dijalankan dengan transparansi penuh, dan memastikan tidak ada konflik kepentingan selama proses berlangsung. Dengan demikian, *probity audit* tidak hanya memberikan jaminan pada tingkat kepatuhan administratif tetapi juga mendukung prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas dalam pelayanan publik.

Probity audit dalam konteks pengadaan barang dan jasa (PBJ) juga meningkatkan efisiensi dan efektifitas dengan memastikan setiap tahapan

dilakukan sesuai prosedur yang benar. *Probity audit* memastikan bahwa semua spesifikasi barang atau jasa yang diadakan sesuai dengan yang dibutuhkan, metode pengadaan yang dipilih optimal, dan evaluasi dilakukan secara objektif [1]. Proses ini selaras dengan prinsip-prinsip efisien dan efektif dalam pengadaan, yang bertujuan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal.

Mengacu pada penelitian terdahulu oleh Samsul Rizal tentang implementasi *probity audit*, ditemukan bahwa *probity audit* pada proyek pembangunan di Kabupaten Wajo menghadapi kendala dalam hal material dan sumber daya manusia. Hasil ini mengindikasikan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan *probity audit* berjalan optimal [10]. Sama halnya dengan kasus pembangunan Gedung Perpustakaan di Kotamobagu, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *probity audit* dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko penyalahgunaan dana apabila dilakukan dengan metode dan pendekatan yang tepat.

Penelitian ini telah memaparkan data terkait penerapan *probity audit* oleh Inspektorat Kota Kotamobagu dan bagaimana hal ini berdampak pada proses pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu. Temuan utama dari penelitian ini mengindikasikan beberapa poin kritis, yaitu penggunaan *probity audit* sebagai alat strategis dalam memastikan efisiensi anggaran serta peningkatan transparansi, dan tantangan operasional seperti keterlambatan pengiriman material. Fokus pada efisiensi anggaran sangat penting mengingat tekanan anggaran pemerintah daerah dan kebutuhan untuk memastikan bahwa belanja publik memberikan nilai terbaik (*value for money*).

Dalam bidang administrasi publik, fleksibilitas ini sesuai dengan karakteristik administrasi publik yang tunduk pada peraturan tetapi harus mampu beradaptasi dengan tantangan yang ada, seperti yang dijelaskan oleh Gray dalam Harbani Pasolong [9]. Kendala seperti keterlambatan material ini menciptakan kebutuhan akan adaptabilitas, suatu elemen yang menandai efisiensi administrasi publik meskipun terikat dengan regulasi yang kaku. Pengadaan publik yang baik harus mampu menavigasi antara kepatuhan terhadap aturan dan kebutuhan nyata di lapangan, terutama saat menghadapi hambatan yang tidak terduga.

Sistem pengendalian internal juga bersandar pada prinsip *probity audit* yang membantu dalam mengidentifikasi kelemahan sistem potensial dan memberikan rekomendasi yang tepat waktu untuk perbaikan sistem [12]. Dalam kasus ini, penerapan *probity audit* diharapkan dapat mengarahkan proyek pembelajaran gedung perpustakaan melalui tahapan yang minimalis resiko kecurangan dan

meningkatkan efektivitas serta efisiensi.

Menurut teori pengadaan barang dan jasa, efisiensi dan efektivitas merupakan dua prinsip utama yang harus ditegakkan. Keterlambatan material konstruksi dapat menyebabkan inefisiensi jika tidak ditangani dengan strategi manajemen yang tepat. Oleh karena itu, intervensi *probity audit* diharapkan tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi kendala material dan fleksibilitas manajemen yang diperlukan. Dalam hal ini, *probity audit* juga memantau bagaimana proyek tersebut menyesuaikan diri dengan situasi yang dinamis supaya tetap sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Probity audit memiliki mekanisme terstruktur yang, dalam konteks proyek ini, bermain dalam mendorong transparansi dan keterbukaan informasi dalam pengadaan barang dan jasa. Mekanisme ini, termasuk tahap perencanaan yang mencakup penilaian risiko dan pengumpulan data, menentukan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip probity dan menawarkan auditing yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan [15].

Kesimpulannya, *probity audit* bukan hanya alat administratif tetapi juga instrumen manajerial penting yang mengedepankan kinerja proyek pengadaan dan perlindungan terhadap . Resiko kecurangan serta manajemen dana yang akuntabel. Dengan menyediakan dasar-dasar pemeriksaan yang ketat dan pengawasan yang cerdas, *probity audit* berfungsi sebagai alat pengembangan efisiensi proyek pembangunan gedung perpustakaan di Kotamobagu, dan dapat menjadi contoh bagi proyek pengadaan barang dan jasa lain di berbagai daerah di Indonesia. keterlambatan pengiriman material melalui jalur laut adalah masalah yang mendasari keperluan audit yang lebih adaptif dan dinamis. *Probity audit* berfungsi untuk memastikan bahwa, meskipun terjadi halangan seperti ini, prinsip-prinsip probity integrity dan management excellence masih berlaku dalam pengaturan proyek. Hal ini menuntut auditor untuk mempertimbangkan keseluruhan operasi dan kerjasama antara berbagai pihak yang terlibat agar dapat memberikan rekomendasi yang tidak hanya patuh pada kebijakan tetapi juga realistis dan dapat dilaksanakan guna mencapai kinerja pengadaan yang maksimal”.

3.2 Akuntabilitas dan Transparansi

Penelitian ini telah memaparkan data terkait penerapan *probity audit* oleh Inspektorat Kota Kotamobagu pada pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu Tahun Anggaran 2022. Peneliti berkomitmen untuk membahas temuan utama, yaitu isu yang ditemukan dalam penerapan audit ini: kurangnya dokumen pendukung, tidak

memadainya transparansi, dan tidak adanya evaluasi kinerja yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang signifikan yang mempengaruhi efektivitas *probity audit* dalam konteks ini.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kurangnya dokumen pendukung yang memadai selama pelaksanaan *probity audit*. Dalam dunia pengelolaan keuangan publik dan pengadaan barang/jasa, dokumen pendukung adalah elemen krusial yang mendasari akuntabilitas dan transparansi. Kurangnya dokumen pendukung menyulitkan proses audit untuk mencapai hasil yang akurat dan mendalam. Sebagai gambaran, *Probity audit* yang berperan memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi sangat bergantung pada ketersediaan dokumen yang relevan dan dapat diakses.

Dalam kaitannya dengan teori administrasi keuangan publik, Gray dalam Harbani Pasolong menekankan pentingnya administrasi publik dalam menjamin transparansi dan distribusi yang adil, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan publik. [9] Ketidacukupan dokumen pendukung mungkin mencerminkan lemahnya infrastruktur administrasi dalam menyediakan rekam jejak yang diperlukan untuk menilai kelayakan dan integritas dari kegiatan yang diaudit. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Kurnia, yang menyatakan bahwa administrasi yang baik harus mampu mencapai tujuan bersama dengan jelas dan terstruktur. Ketiadaan dokumen pendukung dapat menandakan ketidakrampingan dalam proses administrasi tersebut [6].

Dari perspektif penelitian terdahulu, Samsul Rizal mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan *probity audit*, termasuk kendala material dan sumber daya manusia. Ketidakterediaan dokumen pendukung bisa jadi indikasi kurangnya kapasitas atau kompetensi dalam mengelola informasi yang relevan selama proses pengadaan. Studi ini sejalan dengan hasil penelitian Samsul Rizal di Inspektorat Kabupaten Wajo, yang menunjukkan bahwa kendala struktural seperti kekurangan material atau dokumentasi dapat secara signifikan menghambat efektivitas *probity audit* [10].

Kekurangan transparansi dalam proses *probity audit* adalah temuan penting berikutnya. *Probity audit* dirancang untuk memperjuangkan prinsip transparansi sebagai bagian dari tujuan utamanya. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kekurangan ini masih menjadi masalah dalam implementasi di lapangan. Transparansi adalah kunci bagi kepercayaan publik karena memberikan publik hak untuk mengetahui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk keputusan yang diambil dan dasar-dasar bagi keputusan tersebut.

Probity audit berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi selama proyek berlangsung, sebagaimana

yang diamati dalam proyek-proyek sebelumnya. Studi oleh Samsul Rizal (Analisis Implementasi *Probity Audit* dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kabupaten Wajo) menunjukkan bahwa kendala material dapat menjadi faktor penghambat utama dalam pelaksanaan *probity audit*, menempatkan audit tersebut dalam posisi untuk memberikan evaluasi dan saran-skala-kerja yang realistis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip governance yang baik [10].

Penerapan *probity audit* di proyek ini, khususnya di Project Pembangunan Gedung Perpustakaan, perlu memeriksa tidak hanya proses dan aktivitas spesifik yang terjadi, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana pihak-pihak terlibat dapat bekerja secara harmonis dalam memenuhi tenggat waktu pasokan. Ini dapat diwujudkan melalui dialog dengan penyedia jasa logistik dan stakeholder lainnya untuk mempercepat pengiriman atau mencari alternatif lain untuk meminimalisir dampak keterlambatan.

Probity audit, ketika diterapkan secara penuh, berfungsi sebagai sistem pengendalian intern yang kuat yang dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan sumber daya dan memastikan kepatuhan terhadap standar pengadaan barang/jasa [1]. *Probity audit* ini mendukung sistem pengendalian yang lebih baik dengan mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan potensial dalam sistem pengadaan barang dan jasa.

Dalam analisis data dari *probity audit* sebelumnya dan berbagai studi kasus, keterlambatan pengiriman juga dapat dianalisis dari perspektif risiko yang diidentifikasi dalam perencanaan audit. Sebagaimana tertuang dalam penelitian Yolanda Mariana Lekipera da Costa di Inspektorat Daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu fungsi utama *probity audit* adalah memberikan peringatan dini dan evaluasi pada pelaksanaan yang real time, sehingga dapat mempercepat identifikasi dan mitigasi keterlambatan yang disebabkan oleh kendala eksternal seperti logistic [8].

Teori administrasi publik menekankan aspek transparansi sebagai mekanisme untuk menjamin kepatuhan dan mengurangi potensi korupsi (Gray dalam Harbani Pasolong [9]). Ketidaktransparanan dalam proses audit dapat mengedepankan risiko korupsi atau konflik kepentingan, sebagai mana ditunjukkan oleh penelitian Samsul Rizal, yang menemukan isu-isu transparansi sebagai salah satu hambatan utama *probity audit* yang efektif [10]. Dalam studi sebelumnya, Yolanda Mariana Lekipera da Costa menyoroti pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mengawasi pengelolaan keuangan, di mana transparansi memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan berlangsung sesuai dengan norma yang telah ditetapkan [8].

Tidak adanya evaluasi kinerja yang

menyeluruh juga ditemukan sebagai kelemahan dalam pelaksanaan *probity audit*. Evaluasi kinerja memberikan umpan balik yang esensial dan memungkinkan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengendalian. Dalam konteks pengadaan publik yang kompleks, evaluasi kinerja yang teratur dan menyeluruh diperlukan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan untuk memastikan bahwa proses pengadaan sesuai dengan standar akuntabilitas yang diharapkan.

Pengerjaan evaluasi kinerja ini berkaitan erat dengan karakteristik administrasi publik yang mengedepankan penilaian oleh masyarakat demi pencapaian pelayanan yang adil dan bersih [6]. Tidak adanya evaluasi kinerja berimplikasi pada kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang seharusnya memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengadaan dievaluasi untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi.

Melihat penelitian terdahulu oleh Yolanda Mariana Lekipera dan Samsul Rizal, kurangnya evaluasi kinerja dapat mengakibatkan keputusan yang tidak optimal dalam pengadaan barang dan jasa pada level pemerintahan daerah, yang memerlukan perbaikan dan lebih banyak koordinasi antar lembaga. Hasil penelitian oleh Smith, mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa institusi yang memiliki penerapan evaluasi kinerja secara menyeluruh menunjukkan performa yang lebih baik dalam pengadaan public [13].

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peran dokumentasi yang memadai, transparansi, dan evaluasi kinerja dalam mendukung efektifitas probity audit. *Probity audit* seharusnya menjamin bahwa semua proses pengadaan barang/jasa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan regulasi yang ada. Isu-isu yang ditemukan dapat dijadikan dasar untuk memperkuat kapasitas audit serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.

Sebagai penutup, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai tantangan dalam penerapan *probity audit* tetapi juga menyoroti perlunya integrasi yang lebih baik antara prinsip pengadaan barang/jasa yang baik dan pengawasan administrasi publik. Dengan demikian, rekomendasi yang diajukan dapat menjadi acuan untuk perbaikan praktis dan kebijakan bagi instansi terkait di tingkat lokal maupun nasional dalam rangka mencapai standar pelayanan publik yang lebih tinggi dan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *Probity Audit* oleh Inspektorat Daerah Kotamobagu dalam Pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu Pada Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepatuhan Terhadap Peraturan.

Implikasi dari penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu aspek praktis dan aspek teoritis dari penerapan *Probity Audit* oleh Inspektorat Daerah Kotamobagu dalam pembangunan Gedung Perpustakaan pada Tahun Anggaran 2022.

Dari sisi praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *Probity Audit* yang efektif melibatkan kepatuhan terhadap regulasi, pengawasan yang ketat melalui pelibatan konsultan dan auditor independen, serta komunikasi yang intensif antara pihak-pihak terkait. Implikasinya, pemerintah daerah lain dapat mengadopsi pendekatan serupa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pembangunan mereka, dengan menekankan pentingnya komunikasi yang baik sebagai pilar utama dalam pengawasan proyek.

Sementara itu, dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang *Probity Audit* dengan menambahkan bukti empiris mengenai peran penting konsultan pengawas dan auditor independen dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan proyek dengan peraturan yang berlaku. Studi ini juga menegaskan pentingnya teori komunikasi organisasi dalam konteks pengawasan proyek, menunjukkan bahwa komunikasi efektif dapat mencegah kesalahpahaman dan meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi akademisi dan praktisi dalam memahami implementasi *Probity Audit* yang efektif dan efisien dalam konteks pembangunan di pemerintahan daerah.

2. Akuntabilitas dan Transparansi.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *probity audit* oleh Inspektorat Daerah Kotamobagu dalam pembangunan Gedung Perpustakaan Kotamobagu pada tahun anggaran 2022, terdapat berbagai implikasi praktis dan teoritis yang dapat ditarik. Implikasi praktis dari penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan transparansi dalam penyediaan informasi serta kelengkapan dokumen pendukung pada proyek pembangunan. Dengan adanya kekurangan dalam hal ini, pembangunan dapat mengalami hambatan dan menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu, penempatan sistem audit yang lebih transparan dan komprehensif seharusnya menjadi fokus utama bagi pengelola proyek di level pemerintahan

daerah.

Sementara itu, pada tataran teoritis, penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep *probity audit* masih perlu disempurnakan dalam konteks praktis pelaksanaannya, terutama dalam kaitannya dengan evaluasi kerja yang menyeluruh dan tepat waktu. Studi ini dapat menjadi fondasi bagi penelitian lanjutan guna mengembangkan kerangka *probity audit* yang lebih efektif dan adaptif terhadap lingkungan birokrasi di tingkat pemerintahan lokal.

Referensi

- [1] Pemerintah Pusat, *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Indonesia, 2021. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>
- [2] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Indonesia, 2019. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/228512/peraturan-bpkp-no-3-tahun-2019>
- [3] Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/3/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Indonesia, 2008. [Online]. Available: <https://www.kemhan.go.id/itjen/wp-content/uploads/2018/10/bn1086-2016.pdf>
- [4] G. H. Tumbel, *Metode Penelitian Administrasi*. Kupang: Tangguh Denara Jaya, 2023.
- [5] P. Wickens, *Kejujuran dalam Pengadaan di Sektor Publik Pemerintahan Internasional*. 2012.
- [6] Kurnia, *Administrasi Publik yang Transparan dan Terstruktur*. 2023.
- [7] E. E. Masengi, E. M. C. Lumingkewas, and B. F. Supit, *Pengantar Administrasi Publik*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023. [Online]. Available: <https://repository.penerbiteitureka.com/media/publications/567172-pengantar-administrasi-publik-789f8481.pdf>
- [8] U. Y. M. L. da Costa, "Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)," *J. Adm. Publik Indones.*, vol. 5, no. 2, 2018.
- [9] Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- [10] S. Rizal, "Analisis Implementasi Probity Audit dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan di Kabupaten Wajo," *J. Pengelolaan Keuang. Drh.*, vol. 10, no. 1, 2019.
- [11] Mulyadi, *Auditing*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- [12] M. P. Cangemi and T. W. Singleton, *Managing the Audit Function: A Corporate Audit Department Procedures Guide*, 3rd Editio. Wiley, 2003.
- [13] Smith, "Pengaruh Kepatuhan Terhadap Probity Audit dalam Pengelolaan Proyek Pengadaan. *Jurnal Manajemen Publik*," *J. Manaj. Publik*, vol. 8, no. 3, 2012.
- [14] A. R. Dilapanga, "Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow," *J. Civ. Educ. Media Kaji. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, 2018, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/339745748_AKUNTABILITAS_KINERJA_DINAS_PENDIDIKAN_KABUPATEN_BOLAANG_MONGONDOW
- [15] E. Arens and Beasley, *Audit and Assurance Services : An Integrated Approach*. Prentice Hall, 2014.



© 2024 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).